



Available online at

<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/jeamm/issue/view/244>

JEAMM, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2019

Hal. 77-86

E-ISSN 2686-4932 P-ISSN 2686-4932

JEAMM

PENENTUAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN SEBAGAI PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI MARITIM

¹Fajri Hatim, ²Karim Abubakar

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun

²Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Email:

¹fajrihatim@unkhair.co.id ²karim.ngeloiso@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sektor unggulan apa saja yang merupakan sektor dasar pembangunan ekonomi maritim dan merumuskan strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi maritim di Kabupaten Halmahera Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode yang digunakan adalah survey. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yakni kuesioner dan data sekunder yakni data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Selatan dan PDRB provinsi Maluku Utara tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha dan harga konstan. Analisis digunakan dengan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah sektor merupakan sektor basis kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun. Analisis strategi kebijakan pembangunan ekonomi maritim Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa ada tiga kriteria yang dapat dikembangkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi maritim.

Kata Kunci: Sektor Ekonomi Unggulan, Pembangunan Ekonomi Maritim

Dikirim, 13 September 2019
Revisi, 18 September 2019
Diterima, 30 September 2019



Jurnal Ekonomi, Akuntansi
dan Manajemen
Multiparadigma
Volume 1, Nomor 1,
Oktober 2019

ABSTRACT

This study aims to analyze what leading sectors are the basic sectors of maritime economic development in South Halmahera Regency. This research is descriptive study with method used is survey. The data used in this study are primary data namely questionnaires and secondary data namely Gross Regional Domestic Product (GRDP) of South Halmahera Regency and GRDP of North Maluku province periode 2013-2017 according to business field and constant prices. The analysis is used by the Location Quotient (LQ) and Analytical Hierarchy Process (AHP) methods. The results showed that a number of sectors were the base sectors of South Halmahera district for five years. Analysis of the maritime economic development policy strategy in South Halmahera District shows that there are three criteria that can be developed to increase maritime economic development.

Keywords: Leading Economic Sectors, Maritime Economic Development

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan, yang terbesar di dunia terdapat 17.508 pulau, dan juga sebagai negara maritim, pulau-pulau yang tersebar terdapat di wilayah garis katulistiwa, memanjang dari Sabang dari ujung barat tersebut sampai Jayapura yang terletak paling ujung Timur, sepanjang sekitar 5.000 kilometer, dan melintang dari Pulau Miangas dan Pulau Marore yang terletak paling ujung utara sampai Rote dan Pulau Timur dan juga terletak paling ujung selatan sepanjang sekitar 2,000 kilometer, suatu negara maritim meliputi daratan dan wilayah laut (Adisasmita, 2013).

Kusumastanto *et al* (2000) dan Kusumastanto (2006) mengelompokkan aktivitas ekonomi di pesisir, laut dan lautan sebagai ekonomi kelautan (*ocean economy*) yang terdiri dari 7 (tujuh) sektor yakni perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri kelautan/maritim, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan. Batasan secara spasial ekonomi kelautan adalah ke darat adalah wilayah kabupaten/kota pesisir dan ke arah laut adalah wilayah laut sampai ZEE Indonesia serta Landas Kontinen Indonesia.

Menurut Berita Resmi Statistik Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (2018) Kabupaten Halmahera Selatan termasuk kabupaten kepulauan karena wilayahnya didominasi oleh lautan. Wilayah daratan tersebar di pulau-pulau yang tergolong pulau kecil. Ada tujuh pulau/kepulauan utama dengan luas masing-masing Pulau Obi, Pulau Bacan, Pulau Makian, Pulau Kayoa, Pulau Kasiruta, Pulau Mandioli dan semenanjung Pulau Halmahera yang masuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan seluas kurang lebih 2.615 km².

Dari tabel 1 Struktur Ekonomi kabupaten Halmahera Selatan mengalami peningkatan pembangunan ekonomi selama dari tahun 2013 sampai pada tahun 2017. Jika dilihat perkembangan sector ekonomi pada kabupaten Halmahera Selatan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan produksi, pada sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2013 sebanyak 9.26% dan pada tahun 2017, 18.94%.

**Tabel 1 PDRB Provinsi Maluku Utara Atas Harga Konstan tahun 2010 (juta rupiah)
Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2013-2017**

Sektor PDRB	Kabupaten Halmahera Selatan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)					
	Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		36.83	35.6	33.46	32.45	28.38
Pertambangan dan Penggalian		10.16	8.91	8.54	8.27	8.14
Industri Pengolahan		9.25	9.41	9.54	9.93	18.94
Konstruksi		4.71	5.12	5.71	5.92	5.48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		16.72	17.82	18.89	19.29	17.68
Transportasi dan Perdagangan		2.24	2.41	2.43	2.5	2.33
Informasi dan Komunikasi		2.18	2.21	2.32	2.36	2.15
Jasa Keuangan dan Asuransi		1.71	1.75	1.72	1.83	1.66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		10.23	10.67	11.05	11.14	9.49
Jasa Pendidikan		2.87	2.91	2.99	3.02	2.74
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		2.12	2.2	2.29	2.26	2.05
Total PDRB dalam persen (%)		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Halmahera Selatan, Data diolah, 2019

Selanjutnya Pembangunan ekonomi maritim dibutuhkan peran semua sektor yang saling mendukung dalam meningkatkan sektor provinsi di butuhkan peran sektor antar wilayah. Wilayah darat dan wilayah lautan (perairan) terkait sangat erat menjadi menyatu

dalam fungsi khususnya membentuk kawasan-kawasan pantai dan perairan (*marine and coastal zones*). Kawasan pesisir meliputi wilayah perairan dan juga wilayah terdapat saling berkaitan, (Adisasmita, 2006). Selanjutnya Menurut Adisasmita (2013), maritim diartikan sebagai kegiatan di pesisir pantai sampai laut. pembangunan maritim adalah pembangunan yang berkaitan dengan interaksi sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sarana dan prasarana maritim, pembangunan di pulau-pulau dan keterkaitan antar pulau yang di hubungkan perairan atau laut, di mana penekanannya adalah pada dataran pulau, laut sebagai penunjang (pendukung).

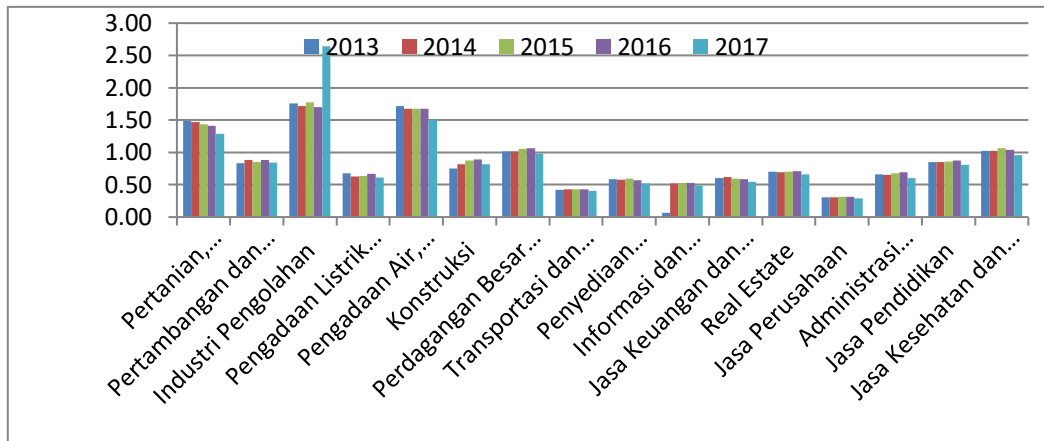
METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif dengan metode survei (Arikunto, 2000). Objek penelitian ini difokuskan di Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan menganalisis sektor unggulan apa saja yang merupakan sektor basis di kabupaten Halmahera Selatan, dalam pembangunan Ekonomi Maritim serta merumuskan Strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi Maritim di kabupaten Halmahera Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (Diperoleh langsung dari responden, melalui teknik wawancara secara mendalam, penyebaran kuesioner dengan para stakeholder dan pada pihak terkait sebanyak tujuh orang (7) yaitu: pihak Kepala Dinas Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Dinas DKP Kabupaten Halmahera Selatan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Halmahera Selatan, Anggota Dewan Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Halmahera Selatan, Dosen Universitas Khairun, Nelayan Kabupaten Halmahera Selatan, dan data sekunder (Data tersebut berupa data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Halmahera Selatan dan PDRB provinsi Maluku Utara tahun 2013-2017 menurut lapangan usaha dan harga konstan).

Analisis digunakan dengan metode *Location Quotient* (LQ) untuk mengetahui sektor unggulan apa saja yang merupakan sektor basis di kabupaten Halmahera Selatan, dalam pembangunan Ekonomi Maritim dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan menggunakan program *Expert Choice 11*, merumuskan Strategi kebijakan dalam pembangunan ekonomi Maritim di kabupaten Halmahera Selatan.

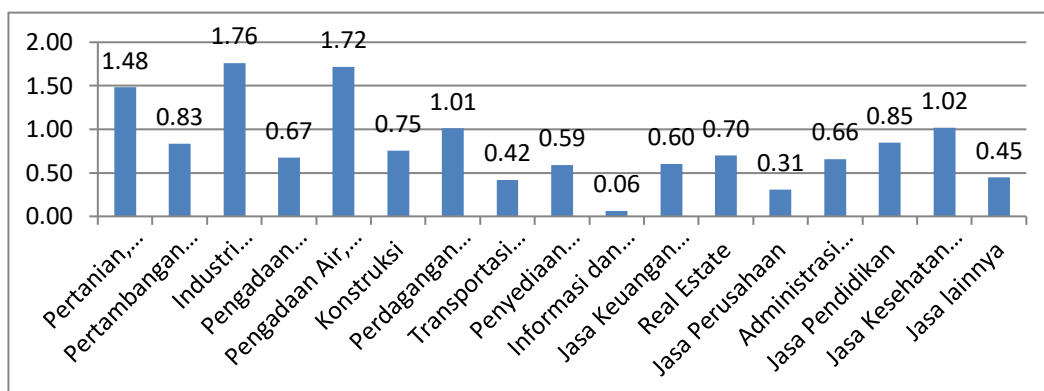
HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisis location quotient (LQ) dari tahun 2013-2017 di Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat Lima subsector yang merupakan subsector basis yaitu: subsector pertanian/kehutanan, industri pengolahan, pengadaan air, perdagangan besar maupun eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan jasa kesehatan/kegiatan sosial. Dari enam belas subsector yang di analisis, subsector industri pengolahan memiliki nilai LQ tertinggi pada tahun 2017 dengan nilai LQ yaitu 2,53. Ke Lima subsector tersebut memiliki kemampuan untuk diekspor ke wilayah lain. Sedangkan sebelas subsector yang lain dari tahun analisis, mengalami penurunan.



Gambar 1 Hasil Perhitungan LQ Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013-2017
Sumber: Data diolah, 2019

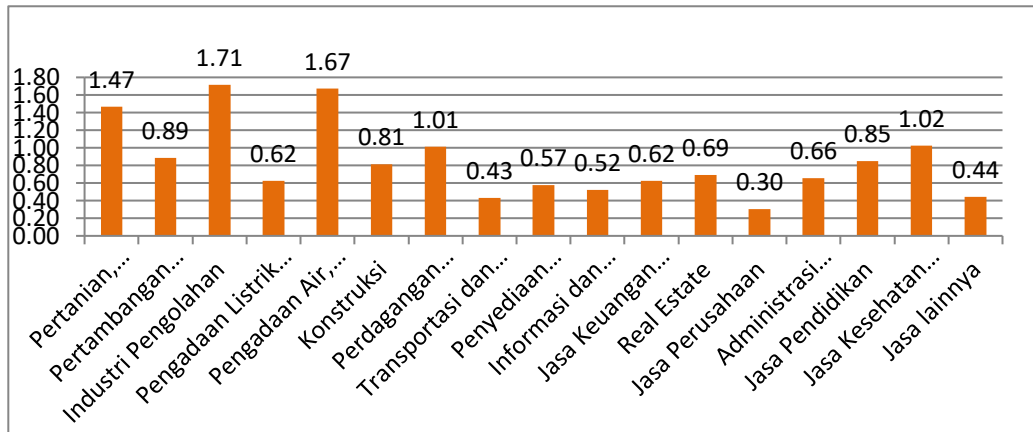
Sedangkan pada tahun 2013 dan tahun 2014 hasil perhitungan LQ pada kabupaten Halmahera Selatan merupakan sektor basis pada semua sektor, hal ini di tunjukan dengan perkembangan grafik, terdapat pada tahun 2013, peningkatan LQ pada kabupaten Halmahera selatan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan ekspor pada wilayah-wilayah di sekitar kabupaten Halmahera selatan dan juga ke wilayah Maluku Utara.



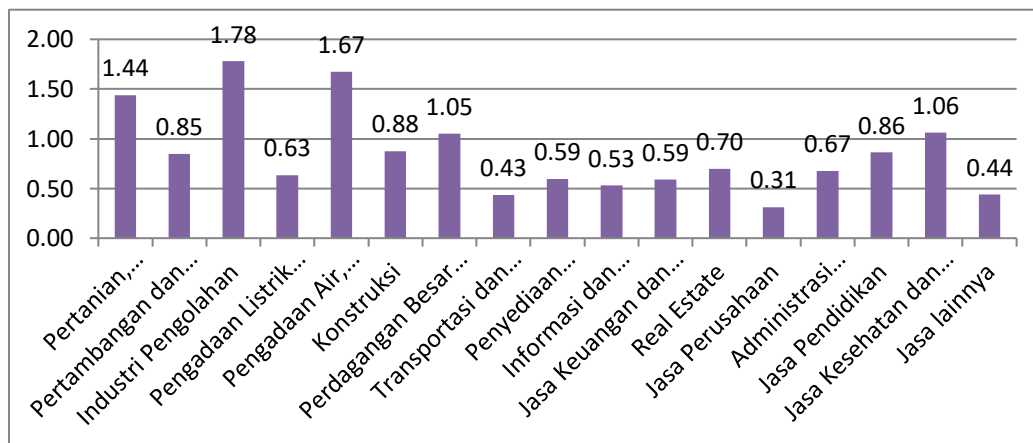
Gambar 2 Hasil Analisis LQ Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2013
Sumber; Data Diolah, 2019

Dari hasil analisis LQ pada Kabupaten Halmahera selatan pada tahun 2013, sektor pertanian merupakan sektor basis. Untuk sektor pertanian dengan nilai LQ tertinggi ke tiga setelah sektor industri pengolahan dengan nilai LQ 1.76 dan pengadaan air LQ 1.72. Nilai LQ yaitu 1,48. Sektor pertanian mempunyai kemampuan untuk diekspor ke wilayah lain.

Subsektor perikanan pada grafik di atas mempunyai nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) sehingga subsektor perikanan merupakan subsektor yang basis di tambah dengan empat sector basis yaitu: industri pengolahan, pengadaan air, perdagangan dan jasa kesehatan



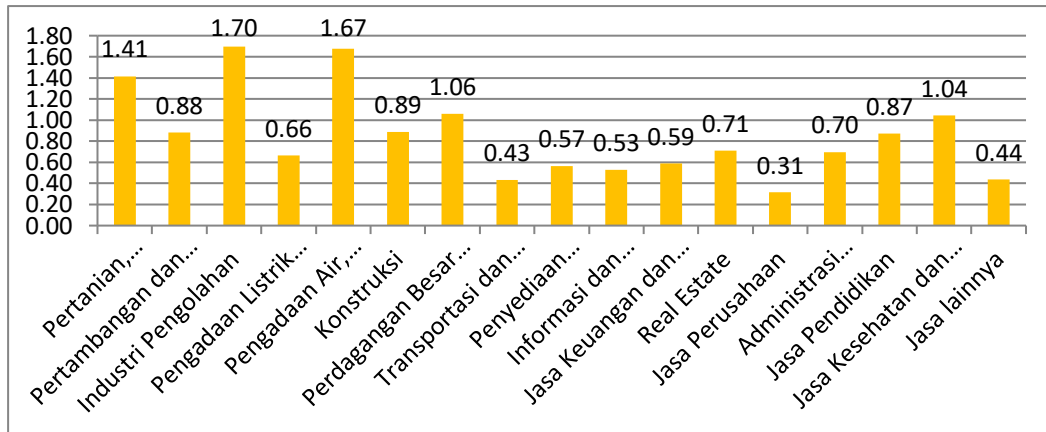
Gambar 3 Hasil Analisis LQ Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014
Sumber: Data Diolah, 2019



Gambar 4 Hasil Analisis LQ kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
Sumber: Data diolah, 2019

Sektor pertanian, industri pengolahan, pengadaan air, perdagangan dan jasa kesehatan pada tahun 2014. ($LQ > 1$) besarnya dari satu tersebut, kelima sektor tersebut merupakan sektor basis yang harus di prioritaskan dalam pengembangan pembangunan ekonomi di Halmahera Selatan.

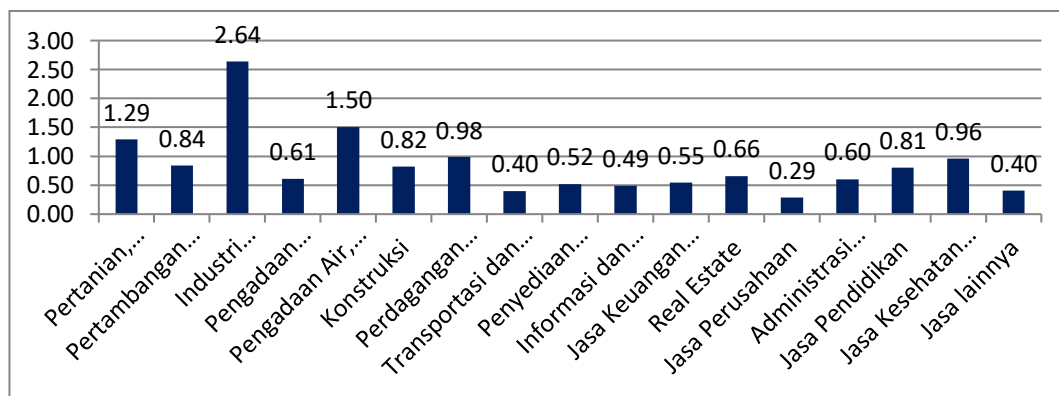
Selama empat tahun dari tahun 2013-2016, sektor perdagangan merupakan sektor basis. Hasil perhitungan LQ sektor industri Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2016 memiliki nilai LQ sebesar 1.70 dan sektor pengadaan barang dan jasa nilai LQ sebesar 1,67, terdapat lima sektor merupakan sektor basis pada di tahun 2016 seperti di terlihat pada tabel di bawah:



Gambar 5 Hasil Analisis LQ Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ) sektor industri dan pertanian Kabupaten Halmahera Selatan. Selama tahun 2017, teridentifikasi merupakan sektor basis ($LQ < 1$) dengan mempunyai nilai LQ pada tahun 2017 pada sektor industri sebesar 2.64 dan pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 1,29. seperti data pada grafik.



Gambar 6 Hasil Analisis LQ Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017

Sumber: Data Diolah .2019

Dapat diketahui bahwa nilai inconsistency yang dihasilkan berkisar antara 0.494 sampai dengan 0.494 yang menunjukkan bahwa nilai inconsistency tersebut berada dibawah nilai inconsistency yang disyaratkan yaitu 0.100 sehingga dapat disimpulkan berarti preferensi responden adalah konsisten karena $CR < 0,100$. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan yang telah dilakukan telah memenuhi syarat konsistensi, sehingga perhitungan tidak perlu diulang lagi atau direvisi.

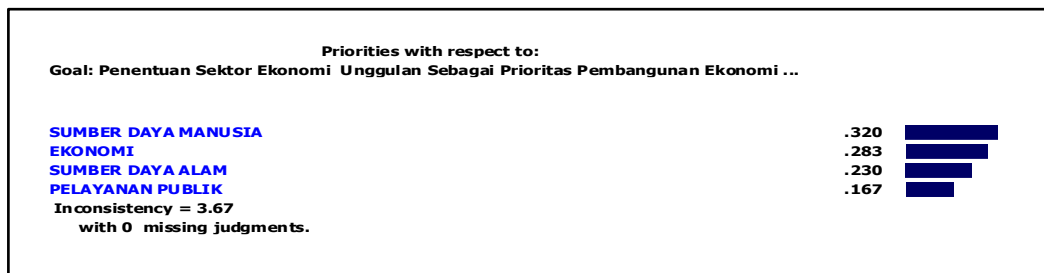
Tabel 2 Nilai Inconsistency

Matrix Perbandingan	Inconsistency
Matrix Perbandingan Kriteria Aspek Strategi Pembangunan Ekonomi Maritim Kabupaten Halmahera Selatan	3.670
Sumber Daya Manusia	3.200
Ekonomi	2.830
Sumber Daya Alam	2.300
Pelayanan Publik	1.670

Matrix Perbandingan	Inconsistency
Matrix Perbandingan Variabel Kriteria Sumber Daya Manusia	3.200
Pendidikan dan Pelatihan	0.900
Partisipasi Masyarakat	0.100
Matrix Perbandingan Variabel Kriteria Ekonomi	2.830
Modal Investasi	0.900
Sarana Produksi	0.100
Matrix Perbandingan Variabel Kriteria Sumber Daya Alam	2.30
Kelautan dan Perikanan	0.488
Pertanian	0.171
Wisata Sejarah	0.171
Wisata Laut	0.171
Matrix Perbandingan Variabel Kriteria Pelayanan Publik	1.670
Perizinan	0.042
Infrastruktur	0.778
Transportasi	0.180

Sumber: Data diolah, 2019

Pembangunan ekonomi maritim, menurut hasil penilaian responden, merupakan sasaran yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

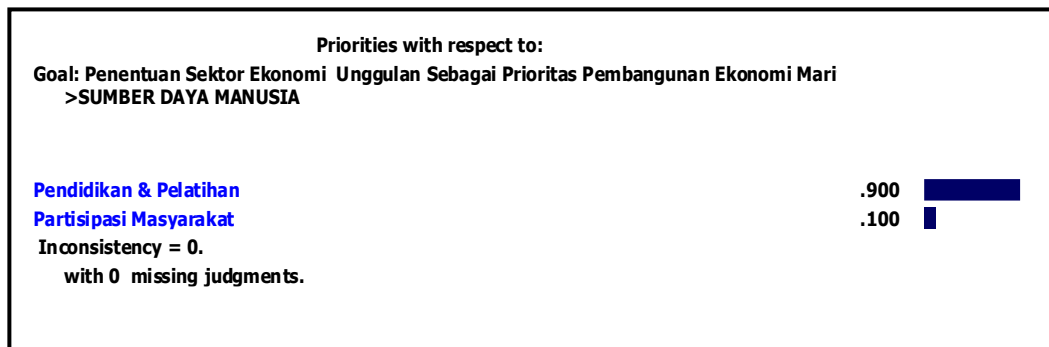


Gambar 7 Bobot Prioritas Perbandingan Semua Kriteria

Sumber: Expert Choice 11. Data diolah.

Strategi pembangunan ekonomi maritim hasil analisis menunjukkan berdasarkan hasil bobot prioritas matriks berpasangan seluruh kriteria dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia (SDM) merupakan kriteria terpenting dalam strategi pembangunan ekonomi maritim Kabupaten Halmahera Selatan, dengan bobot prioritas sebesar 0,320. Prioritas kedua adalah, dengan bobot Ekonomi prioritas sebesar 0,283. Prioritas ketiga adalah Sumberdaya alam, dengan bobot prioritas sebesar 0.230. Dan prioritas keempat adalah Pelayanan Publik, dengan bobot prioritas sebesar 0,167.

Hasil bobot prioritas matriks berpasangan kriteria merupakan hasil bobot prioritas matriks berpasangan sumber daya manusia disajikan pada gambar 8, sebagai berikut:

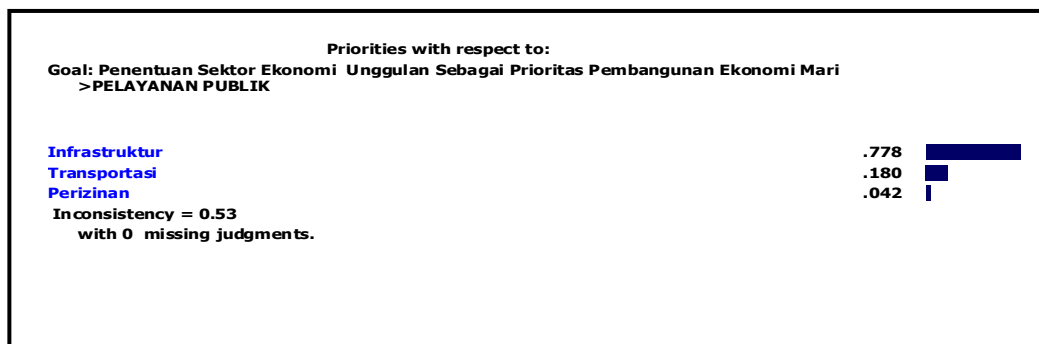


Gambar 8 Bobot Prioritas Perbandingan Sumber Daya Manusia

Sumber: Expert Choice 11. Data diolah

Dari kedua kriteria ini pendidikan dan pelatihan dianggap sangat prioritas dari keseluruhan responden dengan nilai bobot pendidikan & pelatihan yaitu 0,900 atau 0.900 %. Pendidikan & pelatihan menjadi prioritas utama pada sumber daya manusia. Partisipasi Masyarakat mempunyai nilai bobot sebesar 0,100 atau 100 % menjadi prioritas kedua sumberdaya manusia. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pembangunan ekonomi maritim kabupaten Halmahera Selatan sangat penting.

Prioritas pelayanan publik dianggap sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi maritim Kabupaten Halmahera Selatan dengan bobot prioritas pelayanan publik sebesar 0,530. Menurut persepsi responden pelayanan publik kriteria infrastruktur sangat penting dengan nilai bobot sebesar 0,778, dengan mengembangkan infrastruktur kabupaten Halmahera Selatan akan mampu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



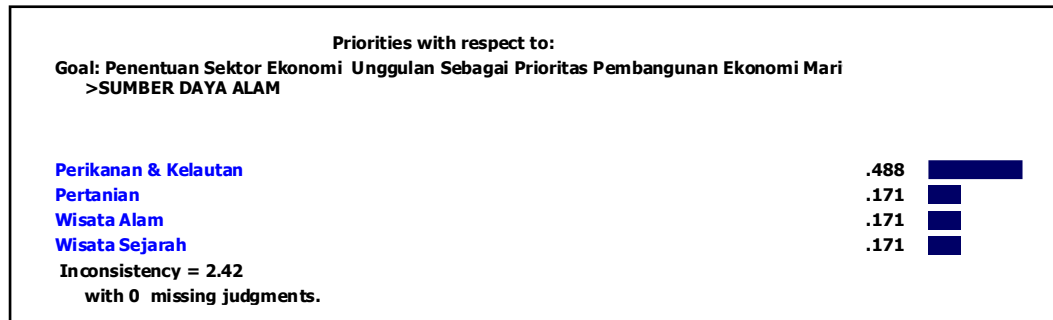
Gambar 9 Bobot Prioritas Perbandingan Pelayanan Publik

Sumber: Expert Choice 11. Data diolah

Sedangkan pelayanan publik dalam pembangunan ekonomi maritim, prioritas transportasi, nilai bobot sebesar 0,180, bobot ini dikemukakan oleh responden dengan alasan bahwa, sarana dan prasarana dasar mempunyai peran sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang di tunjukan pada paran transportasi yang dapat mengangkut orang, barang, dan jasa dari pulau satu ke pulau yang lain.

Kriteria perizinan dengan bobot sebesar 0.043 sebuah perizinan yang diciptakan pemerintah merupakan daya tarik tersendiri bagi para pengusaha asing maupun pengusaha loka untuk menanam investasi dalam rangka membuka lapangan usaha dan mengelola hasil sumberdaya yang terdapat di kabupaten Halmahera Selatan.

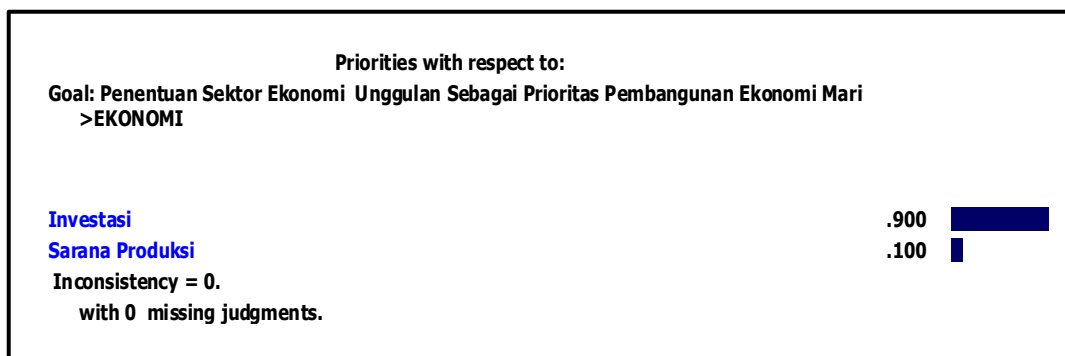
Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa kriteria perikanan & kelautan yang lebih ditekankan dalam pembangunan ekonomi maritim Kabupaten Halmahera Selatan, maka perikanan & kelautan menempati prioritas kriteria utama dengan bobot 0,488 dan prioritas pertanian nilai bobot sebesar 0,171. Kriteria pemilihan responden pada wisata alam dan wisata sejarah, peningkatan pembangunan ekonomi maritime Kabupaten Halmahera selatan, terdapat bobot yang sama pada kriteria pertanian, dengan sebesar pada kriteria wisata sejarah sebesar,171 dan wisata alam sebesar0,171.



Gambar 10 Bobot Prioritas Perbandingan Sumber Daya Alam

Sumber: Expert Choice 11. Data diolah.

Aspek ekonomi di modal investasi dengan bobot prioritas sebesar 0.900. Prioritas kriteria kedua adalah sarana produksi dengan bobot prioritas sebesar 0.100. Hasil bobot prioritas matriks pasangan alternatif berdasarkan ekonomi pada gambar 1.6. Sebagai berikut:



Gambar 11 Bobot Prioritas Perbandingan Ekonomi

Sumber: Expert Choice 11. Data diolah.

Dari kedua kriteria, modal investasi dianggap sangat prioritas dari keseluruhan responden dikarenakan peran investasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi maritim, diarahkan berbagai kegiatan, meningkatkan nilai produksi regional bruto, meningkatkan perluasan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur. Sedangkan kriteria sarana produksi nilai bobot 0,100 menjadi prioritas kedua dalam penilaian responden,

SIMPULAN

Dari hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, hasil analisis sektor unggulan kabupaten Halmahera selatan untuk pembangunan ekonomi maritim kabupaten Halmahera. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor Perdagangan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang merupakan sektor basis kabupaten Halmahera Selatan selama lima tahun dari tahun 2013-2017. Hasil analisis strategi kebijakan pembangunan ekonomi maritim Kabupaten Halmahera Selatan.

Aspek sumber daya manusia merupakan prioritas pertama, prioritas kedua aspek ekonomi, prioritas sumber daya manusia kriteria dengan nilai bobot tertinggi terdapat pada kriteria pendidikan dan pelatihan, kriteria infrastruktur dan perikanan dan kelautan, ketiga kriteria ini menjadikan kriteria yang dikembangkan untuk peningkatan pembangunan ekonomi maritim.

Dari pembahasan dua rekomendasi yaitu: *pertama*, Bagi pemerintah daerah kabupaten Halmahera selatan lebih meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dengan mengembangkan sektor yang merupakan sektor basis maupun sektor non basis kabupaten Halmahera Selatan agar supaya bisa membuka lapangan kerja kepada masyarakat dan menghasilkan pendapatan daerah yang ada di kabupaten Halmahera Selatan. *Kedua*. Melaksanakan pembangunan ekonomi maritim. kabupaten Halmahera Selatan, perlu kiranya peran Pemerintah, dunia Akademik, dan masyarakat terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, yakni pemerintah daerah kabupaten Halmahera Selatan perlu kerja sama meningkatkan skil. Penyediaan infrastruktur untuk mengelola sumberdaya alam yakni perikanan dan kelautan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. R. 2013. *Pembangunan Ekonomi Maritim*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita. R. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Adisasmita. R. 2006. *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*. Graha Ilmu Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS Kabupaten Halmahera Selatan. Statistik Daerah. www.halmaheraselatankab.bps.go.id.
- BKPM Provinsi Maluku Utara. 2019. Potensi Sumber Daya Alam Halmahera Selatan. <http://www.bkpmprovmalut.net/potensi-di-tiap-kabkota-provinsi-maluku-utara/kabupaten-halmahera-selatan/>
- Kusumastanto, T. *et al.* 2000. *Kajian Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Oseanologi LIPI.
- Kusumastanto, T. 2006. *Ekonomi Kelautan (Ocean Economics-Oceanomics)*. PKSPL-IPB. Bogor